

RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN

PT BPR BATU ARTOREJO

Daftar Isi

PENDAHULUAN

A. RINGKASAN EKSEKUTIF

- A.1. Pencapaian Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan
- A.2. Visi dan Misi dalam implementasi keuangan berkelanjutan
- A.3. Tujuan rencana aksi keuangan berkelanjutan
- A.4. Program yang akan dilaksanakan dalam RAKB
- A.5. Alokasi Sumber Daya untuk melaksanakan program RAKB
- A.6. Penanggung jawab pelaksanaan program RAKB

B. PROSES PENENTU RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN

- B.1. Rujukan Keuangan Berkelanjutan
- B.2. Pihak yang terlibat RAKB

C. Faktor Penentu Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

- C.1. Rencana Strategis Bank
- C.2. Kapasitas Organisasi
- C.3. Kondisi Keuangan dan Kapasitas Teknis
- C.4. Strategi, Sistem dan Faktor Lainnya

D. PRIORITAS DAN URAIAN RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN

- D.1. Dasar Pemikiran
- D.2. Kegiatan Berkelanjutan dalam tahun 2025
- D.3. Sumber Daya
- D.4. Program Evaluasi Pelaksanaan
- D.5. Tantangan dan Rencana

E. Tindak Lanjut RAKB dan Evaluasi RAKB

- E.1. Pegawai, Pejabat dan Unit Kerja yang Bertanggung Jawab terhadap Monitoring dan Evaluasi
- E.2. Penentuan Waktu untuk Mengukur Realisasi RAKB
- E.3. Tindak lanjut dari rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan
- E.4. Mitigasi Risiko Dalam Hal Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Tidak Dapat Dilaksanakan dengan Baik atau Tidak Mencapai Tujuan yang diinginkan

PENUTUP

1
2
2
4
5
5
6
7

10
10

11
12
13
14

15
15
16
16
16

17
17
18
18

20

Pendahuluan

Sehubungan dengan Penerapan Keuangan Berkelanjutan (*Sustainable Finance*) di Indonesia yang mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.51/POJK.03/52017 tanggal 27 Juli 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, emiten, dan Perusahaan Publik, PT BPR Batuartorejo bermaksud merespon kebijakan tersebut dengan menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) PT BPR Batuartorejo Tahun 2025 sebagai pondasi dan landasan strategik untuk menerapkan Keuangan Berkelanjutan Bank.

PT BPR Batuartorejo berkomitmen untuk menerapkan Keuangan Berkelanjutan dengan menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) agar dapat secara efektif mengimplementasikan Keuangan Berkelanjutan (*Sustainable Finance*) untuk periode 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan 2025 – 2029. Walaupun di tahun 2025 kami belum bisa mengimplementasikan namun untuk tahun 2026 kami akan berupaya untuk mengimplementasikan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) tersebut.

Sebagai acuan yang kami gunakan dalam menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) yaitu POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik dan/atau Pedoman Teknis bagi Bank terkait implementasi Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017.

Tahun 2025 seharusnya merupakan tahun kedua implementasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB), tetapi kami belum bisa melaksanakan walaupun sudah merencanakan, sehingga belum tersedia data hasil penerapan Keuangan Berkelanjutan yang memadai mengenai pelaksanaan sebagaimana yang direncanakan pada tahun 2025.

A. Ringkasan Eksekutif

A.1. Pencapaian Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Berikut Jumlah produk dan nominal penyaluran dana yang memenuhi kriteria kegiatan usaha Berkelanjutan posisi Tahun 2025 sesuai pada tabel di bawah ini:

Tabel Pencapaian Keuangan Berkelanjutan

Nama Komponen	Posisi Tahun 2024	Realisasi Pelaporan 2025 (TW 3)	Target Pelaporan 2025	Target Tahun 2026
a. Jumlah Produk Penghimpunan dana Berkelanjutan	2	2	2	2
1. Penghimpunan Dana/DPK	2	2	2	2
2. Surat Berharga yang diterbitkan	-	-	-	-
3. Lainnya	-	-	-	-
b. Outstanding Penghimpunan Dana Berkelanjutan (Rp)	11.579.297.023	10.543.189.185	11.067.086.585	11.067.086.585
1. Penghimpunan Dana/DPK	11.579.297.023	10.543.189.185	11.067.086.585	11.067.086.585
2. Surat Berharga yang diterbitkan	-	-	-	-
3. Lainnya	-	-	-	-
c. Jumlah Penyaluran Dana Berkelanjutan	2	2	2	2
1. Pembiayaan/Kredit	2	2	2	2
2. Surat Berharga yang dimiliki	-	-	-	-
3. Lainnya	-	-	-	-
d. Outstanding Penyaluran Dana Berkelanjutan (Rp)	19.333.533.400	19.979.433.400	19.822.183.400	19.822.183.400
1. Pembiayaan/Kredit	19.333.533.400	19.979.433.400	19.822.183.400	19.822.183.400
2. Surat Berharga yang dimiliki	-	-	-	-
3. Lainnya	-	-	-	-
• Total Kredit/Pembiayaan Kepada pihak ketiga (Rp)	19.333.533.400	19.979.433.400	19.822.183.400	19.822.183.400
• Persentase total kredit /pembiayaan berdasarkan kategori kegiatan usaha berkelanjutan (%)	100 %	100 %	100 %	100 %
• Jumlah dan Kualitas kredit/pembiayaan berdasarkan kategori kegiatan usaha berkelanjutan	19.333.533.400	19.979.433.400	19.822.183.400	19.822.183.400
a. Energi terbarukan	-	-	-	-

b. Efisiensi Energi	-	-	-	-
c. Pencegahan dan pengendalian Polusi	-	-	-	-
d. Pengelolaan Sumberdaya Alam Hayati dan penggunaan Lahan yang Berkelanjutan	-	-	-	-
e. Konservasi Keanekaragaman Hayati Darat dan air	-	-	-	-
f. Transportasi Ramah Lingkungan	-	-	-	-
g. Pengelolaan air dan Air Limbah Yang berkelanjutan	-	-	-	-
h. Adaptasi perubahan iklim	-	-	-	-
i. Produk yang dapat mengurangi penggunaan sumberdaya dan menghasilkan lebih sedikit polusi (<i>eco-efficient</i>)	-	-	-	-
j. Bangunan berwawasan lingkungan yang memenuhi standar atau sertifikasi yang diakui secara nasional, regional atau internasional	-	-	-	-
k. Kegiatan usaha dan/ atau kegiatan lain yang berwawasan lingkungan lainnya	-	-	-	-
l. Kegiatan UMKM	19.333.533.400	19.979.433.400	19.822.183.400	19.822.183.400

Tabel NPL Gross Kredit berdasarkan kategori kegiatan usaha berkelanjutan

Nama Komponen	Posisi Tahun 2024	Realisasi Pelaporan 2025 (TW 3)	Target Pelaporan 2025	Target Tahun 2026
% NPL NPF Gross Kredit/pembiayaan berdasarkan kategori kegiatan usaha berkelanjutan	39.59 %	35.41 %	46.11 %	40.00%
a. Energi terbarukan	-	-	-	-
b. Efisiensi Energi	-	-	-	-
c. Pencegahan dan pengendalian Polusi	-	-	-	-
d. Pengelolaan Sumberdaya Alam Hayati dan penggunaan Lahan yang Berkelanjutan	-	-	-	-
e. Konservasi Keanekaragaman Hayati Darat dan air	-	-	-	-
f. Transportasi Ramah Lingkungan	-	-	-	-

g. Pengelolaan air dan Air Limbah Yang berkelanjutan	-	-	-	-
h. Adaptasi perubahan iklim	-	-	-	-
i. Produk yang dapat mengurangi penggunaan sumberdaya dan menghasilkan lebih sedikit polusi (<i>eco-efficient</i>)	-	-	-	-
j. Bangunan berwawasan lingkungan yang memenuhi standar atau sertifikasi yang diakui secara nasional, regional atau internasional	-	-	-	-
k. Kegiatan usaha dan/ atau kegiatan lain yang berwawasan lingkungan lainnya	-	-	-	-
l. Kegiatan UMKM	39.59 %	35.41 %	46.11 %	40.00%

A.2. Visi dan Misi Implementasi Keuangan Berkelanjutan

VISI :

Menjadi Bank Perekonomian Rakyat yang dapat memberi nilai tambah yang memadai dan memberi pelayanan yang memuaskan kepada para pemangku kepentingan dengan memperhatikan keselarasan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup di lingkup sekitar perbankan maupun masyarakat luas.

MISI:

1. Bank Melakukan fungsi intermediasi yang baik menjadi perantara antara pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana dengan mewujudkan penerapan Keuangan Berkelanjutan yang mampu mendorong kesejahteraan dilingkungan setempat maupun masyarakat pada umumnya.
2. Menumbuhkan bisnis terutama perkreditan baik yang berwawasan dengan keuangan berkelanjutan maupun berwawasan kredit umum.
3. Menyeimbangkan tingkat pertumbuhan kredit dengan tingkat pertumbuhan dana pihak ketiga baik yang berwawasan umum maupun berwawasan keuangan berkelanjutan.
4. Menerapkan manajemen resiko secara konsisten, supaya pertumbuhan aset tetap dalam kondisi sehat dan bank dapat tumbuh secara berkelanjutan.

A.3. Tujuan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Sejalan dengan visi dan misi yang ingin dicapai, tujuan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan yaitu : Menjadi Bank Perekonomian Rakyat yang dapat memberi nilai tambah yang memadai dan memberi pelayanan yang memuaskan kepada para pemangku kepentingan dengan memperhatikan keselarasan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup di lingkup sekitar maupun masyarakat luas yang dilaksanakan melalui strategi utama yaitu meningkatkan kualitas pelayanan, menjalankan organisasi yang berbasis kinerja serta penyesuaian sumber daya manusia dengan kebutuhan strategis, integrasi aspek sosial dan lingkungan hidup ke dalam pengelolaan risiko serta meningkatkan pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga pada kegiatan usaha yang berwawasan umum dan berwawasan lingkungan hidup.

Mengacu pada POJK No. 51/POJK.03/2017 tanggal 27 Juli 2017 perihal Keuangan Berkelanjutan BPR sebagai Lembaga Jasa keuangan memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan konsep keuangan berkelanjutan secara bertahap.

Dalam implemenntasinya BPR wajib menyusun RAKB yang merupakan dokumen komprehensif yang menggambarkan rencana kegiatan usaha baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Target net Zero Emission

- | | |
|--|------------|
| 1. Target nett zero emission untuk Operasional | Tahun 2050 |
| 2. Target nett zero emission untuk pembiayaan | Tahun 2050 |

A.4. Program Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

a. Rencana jangka pendek dalam satu tahun :

No	Periode Pelaksanaan	Uraian Aktivitas	Tujuan Aktifitas	Indikator Pencapaian
1	Feb s.d Mar 2025	Pembuatan Surat Edaran mengenai pemeliharaan dan menjaga lingkungan	Menumbuhkan kesadaran diantara karyawan untuk senantiasa menjaga lingkungan	Menjaga kebersihan lingkungan kantor dan sekitar
2	Feb s.d Mar 2025	Efisiensi Penggunaan listrik	Meningkatkan kesadaran kepada karyawan untuk efisiensi penggunaan energi listrik	Penggunaan Lampu LED pada area kerja, pengurangan penggunaan Pendingin Ruangan
3	Feb s.d Mar 2025	Mengurangi Penggunaan Kertas dan ATK	Penghematan penggunaan Kertas dan ATK	Menggunakan kertas secara hemat dengan mencetak berkas hanya yang diperlukan
4	Feb s.d Mar 2025	Penggunaan tempat minuman yang dapat digunakan berulang	Pengurangan sampah plastik yang sulit terurai	Mengurangi penggunaan air minum dengan kemasan satu kali pakai dan

				menggunakan tempat makan/ minum yang dapat dipakai secara berulang
5	Feb s.d Mar 2025	Penyusunan SOP implementasi Keuangan Berkelanjutan	Menyusun Standard Operasional Prosedur perihal implementasi Keuangan berkelanjutan	Pembuatan SOP Keuangan Berkelanjutan

b. Program rencana jangka panjang selama 5 (Lima) Tahun :

No	Tahun	Target Kegiatan	Indikator Pencapaian
1	2025	Pembuatan Surat Edaran mengenai pemeliharaan dan menjaga lingkungan	Menjaga kebersihan lingkungan kantor dan sekitar
2	2025	Efisiensi Penggunaan listrik	Penggunaan Lampu LED pada area kerja, pengurangan penggunaan Pendingin Ruangan
3	2025	Mengurangi Penggunaan Kertas dan ATK	Memakai kertas secara hemat dan memulai budaya <i>Paperles</i> dan/ atau <i>e-office</i>
4	2025	Penggunaan tempat minuman yang dapat digunakan berulang	Mengurangi penggunaan air minum dengan kemasan satu kali pakai dan menggunakan tempat makan/ minum yang dapat dipakai secara berulang
5	2025	Penyusunan SOP implementasi Keuangan Berkelanjutan	Pembuatan SOP Keuangan Berkelanjutan
6	2026	Memiliki Produk Keuangan Berkelanjutan dan Melakukan kajian terkait pembiayaan pada usaha ramah lingkungan	Dilakukan kajian terkait produk pembiayaan usaha daur ulang kertas, plastik dan lainnya
7	2027	Kegiatan edukasi terhadap Debitur tentang keuangan berkelanjutan	Edukasi kepada debitur terkait kategori kegiatan usaha berkelanjutan
8	2028	Pengembangan pertumbuhan portofolio kredit/pembiayaan keuangan sebesar 10% dari tahun awal implementasi keuangan berkelanjutan	Jumlah kredit/pembiayaan Keuangan Berkelanjutan tumbuh 10% dari tahun awal implementasi.

A.5. Alokasi Sumber Daya

Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan diatas membutuhkan sumber daya yang antara lain terdiri dari penyediaan anggaran yang bersumber dari internal perusahaan yang dipergunakan untuk kegiatan pelatihan, sosialisasi dan pengembangan sistem yang mendukung keberlanjutan. Kegiatan Penerapan Keuangan Berkelanjutan akan dilaksanakan oleh Divisi Penanggung jawab/program kerja dengan melibatkan setiap organ dalam struktur organisasi.

Alokasi sumber dana yang direncanakan untuk menunjang kegiatan sebesar
Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Penanggungjawab dan pelaksana seluruh aktifitas Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan agar dapat berjalan sesuai dengan rencana kegiatan

- Dewan komisaris bertanggungjawab untuk memberikan arahan strategis dan pengawasan implementasi RAKB
- Direksi bertanggungjawab untuk pengambilan keputusan dan pengawasan terhadap pelaksanaan RAKB
- Unit utama pelaksana kegiatan RAKB dilaksanakan oleh Divisi kepatuhan dan manajemen risiko dibantu oleh seluruh struktur organisasi didalam perusahaan

A.6. Penanggung Jawab Pelaksana RAKB

1. Divisi bisnis menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) setiap tahun termasuk bekerjasama dengan satuan kerja terkait khususnya dalam memproyeksikan rencana kegiatan yang masuk dalam kategori Keuangan Berkelanjutan.
2. Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko memastikan penyusunan pedoman perusahaan dalam Aksi Keuangan Berkelanjutan Bank, melakukan review dan memberikan rekomendasi terkait aspek Kepatuhan terhadap Program Aksi Keuangan Berkelanjutan Bank. Selanjutnya melakukan monitoring Risiko Bank (Kredit dan Risiko Lainnya) terkait penerapan Aksi Keuangan Berkelanjutan Bank.
3. Divisi Personalia melakukan pengembangan kapasitas intern pegawai terkait penerapan Keuangan Berkelanjutan.
4. Seluruh karyawan menjadi penanggungjawab pelaksanaan program keuangan berkelanjutan.
5. Divisi Dana dan Jasa dengan menerbitkan atau mengembangkan produk/jasa Keuangan Berkelanjutan serta mengelola pelaksanaan Program Aksi Keuangan Berkelanjutan Bank yang menjadi tugasnya. (Pengembangan Produk).
6. Divisi Teknologi Informasi melakukan penyesuaian sistem teknologi dan pelaporan Keuangan Berkelanjutan.
7. Mitra Kerjasama
 - a. **Mitra Regulator** Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia memiliki peran krusial sebagai pemberi arah dan pengawas implementasi keuangan berkelanjutan di BPR. OJK memberikan kerangka regulasi, pedoman teknis, serta melakukan supervisi berkala

terhadap pelaksanaan program keuangan berkelanjutan, termasuk evaluasi laporan dan pemberian insentif regulasi bagi BPR yang berkomitmen pada praktik berkelanjutan. Bank Indonesia mendukung melalui kebijakan makro prudensial, penyediaan skema pembiayaan atau refinancing untuk produk berkelanjutan, serta edukasi manajemen risiko lingkungan dan sosial. Kolaborasi dengan regulator diwujudkan melalui konsultasi rutin, partisipasi dalam program pelatihan dan sosialisasi, pelaporan berkala sesuai format yang ditetapkan, serta koordinasi dalam pengembangan produk pembiayaan hijau yang sesuai dengan kapasitas dan karakteristik BPR.

- b. **Mitra lembaga lain** mencakup lembaga keuangan, pemerintah daerah, dan asosiasi yang memberikan dukungan operasional dan strategis. Bank umum, Bank Pembangunan Daerah, dan sesama BPR menjadi mitra dalam channeling pendanaan, joint financing, serta berbagi best practices implementasi keuangan berkelanjutan. Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Koperasi dan UMKM, serta Bappeda berperan dalam verifikasi proyek ramah lingkungan, identifikasi calon debitur UMKM berkelanjutan, dan sinkronisasi dengan program pembangunan daerah. Perbarindo (Perhimpunan BPR Indonesia) dan asosiasi UMKM menjadi forum koordinasi antar BPR serta wadah identifikasi dan pembinaan calon debitur yang menjalankan usaha berkelanjutan. Kolaborasi ini memperkuat ekosistem keuangan berkelanjutan melalui sinergi pendanaan, pembinaan, dan alignment dengan program pembangunan daerah yang mendukung pencapaian target ESG BPR.
- c. **Mitra Konsultan** keuangan berkelanjutan, IT / Digital, dan HR berperan sebagai pendamping teknis dalam transformasi BPR menuju institusi keuangan berkelanjutan. Konsultan keuangan berkelanjutan melakukan assessment kondisi existing terhadap aspek ESG, menyusun roadmap dan action plan, mengembangkan framework penilaian risiko lingkungan dan sosial, serta memberikan pendampingan dalam penyusunan kebijakan, prosedur, dan sistem scoring pembiayaan berkelanjutan. Konsultan IT mengembangkan sistem informasi untuk tracking portfolio berkelanjutan, membangun dashboard monitoring ESG metrics, dan mengintegrasikan sistem pelaporan yang efisien. Konsultan HR merancang program pelatihan keuangan berkelanjutan untuk seluruh level organisasi, mengembangkan competency framework untuk sustainable finance officer, dan melakukan change management dalam proses transformasi. Keterlibatan para konsultan ini memastikan implementasi yang terstruktur, terukur, dan sesuai dengan standar internasional keuangan berkelanjutan.

- d. **Mitra lainnya** seperti universitas, NGO, perusahaan teknologi, lembaga sertifikasi, dan media memberikan dukungan strategis yang memperkaya implementasi keuangan berkelanjutan. Lembaga penelitian dan universitas menyediakan riset, kajian best practices, tenaga ahli sebagai advisor, serta program capacity building dan sertifikasi yang meningkatkan kredibilitas SDM BPR. NGO lingkungan dan lembaga pemberdayaan masyarakat berperan dalam verifikasi proyek ramah lingkungan, identifikasi calon debitur dari komunitas marginal, serta program pemberdayaan UMKM perempuan dan literasi keuangan. Perusahaan teknologi dan fintech menyediakan platform digital untuk akses pembiayaan, solusi payment yang efisien, dan integrasi data untuk assessment risiko ESG. Lembaga sertifikasi memberikan sertifikasi standar internasional (ISO 14001, dll) dan melakukan audit independen untuk meningkatkan kredibilitas eksternal. Media dan komunitas mendukung sosialisasi program, publikasi success stories, dan membangun brand awareness BPR sebagai BPR berkelanjutan yang memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan.

B. Proses Penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

B.1. Rujukan Keuangan yang digunakan

Rujukan yang digunakan sebagai acuan di PT. BPR Batuartorejo dalam menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan adalah sebagai berikut:

1. Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap I di Indonesia 2015–2019
2. Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II di Indonesia 2021–2025
3. Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan perusahaan Publik
4. Pedoman Teknis Bagi Bank terkait Implementasi Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan perusahaan Publik.

B.2. Pihak yang terlibat

Pihak yang terlibat dalam Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) ini oleh Divisi Bisnis yang didukung oleh keterlibatan unit kerja yang terkait dengan prioritas implementasi keuangan berkelanjutan antara lain sebagai berikut :

1. Penyusunan Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan oleh divisi Bisnis yang dilaksanakan oleh Direksi
2. Pengembangan Kapasitas Intern yang melibatkan Divisi Umum (Personalia). Divisi umum dapat melaksanakan pengembangan dengan melakukan pelatihan yang berbasis Aksi Keuangan Berkelanjutan.
3. Penyesuaian organisasi, Manajemen Resiko, tata Kelola, dan SOP melibatkan divisi bisnis, divisi TI, SDM dan Umum, divisi Kepatuhan.
4. Langkah strategis khususnya terkait penentuan Prioritas Program Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan jangka pendek dan jangka panjang diarahkan oleh Direksi melalui persetujuan Dewan komisaris.

C. Faktor Penentu Rencana Aksi keuangan Berkelanjutan

C.1. Rencana Strategi

Bank berencana akan melakukan merger dengan tiga bank yaitu BPR Pareartorejo dan BPR Tumpangprima Artorejo untuk memenuhi undang-undang P2SK. Meningkatkan kuantitas dan kualitas portofolio kredit tetap menjadi prioritas dalam menyusun Rencana Kerja. Menyesuaikan dengan kondisi pasar pada saat ini BPR Batuartorejo dan kantor cabang BPR Batuartorejo akan terus mengembangkan dan menyediakan produk-produk yang sesuai kebutuhan masyarakat kota Batu dan disekitar kantor cabang BPR Batuartorejo pada umumnya dengan target pasar utama adalah Pengusaha UMKM dan juga pembiayaan kredit kepada pegawai perusahaan yang telah bekerjasama dan bekerjasama dengan dealer sepeda motor Honda disekitar domisili Bank. BPR Batuartorejo juga akan meningkatkan portofolio kredit untuk membantu kredit UMKM sesuai dengan arah dari Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Untuk menunjang hal tersebut BPR Batuartorejo akan melaksanakan pelatihan-pelatihan kepada para pegawai agar bisa menyesuaikan dengan arah kebijakan ekonomi dan dapat meminimalisir risiko yang akan tumbuh dikemudian hari. Menyesuaikan dengan kebutuhan pasar maka Bank akan fokus pada peningkatan laba dan selalu memperhatikan RAKB sesuai dengan arahan dari OJK dengan cara:

- a. Penyesuaian prosedur penyaluran kredit.
- b. Membangun website untuk kebutuhan nasabah
- c. Mengadakan literasi dan Inklusi keuangan

Sesuai dengan visi BPR Batuartorejo untuk menjadi Bank yang dapat memberi nilai tambahan dan peningkatan pelayanan di BPR Batuartorejo mempunyai strategi sebagai berikut:

- a. BPR Batuartorejo akan meningkatkan kualitas dan kuantitas kredit di Wilayah Kota Batu dan wilayah kantor cabang dan sekitarnya
- b. Mengikuti seminar dan/atau pelatihan yang dilaksanakan oleh pihak otoritas untuk menambah wawasan yang berkaitan dengan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB).
- c. Memberikan fasilitas layanan prioritas kepada nasabah dengan penyempurnaan informasi tentang BPR melalui Website BPR.
- d. Pembuatan promosi audio maupun Video di Jejaring Sosial.

BPR Batuartorejo berencana untuk memulai implementasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) di lingkungan Bank dan kantor cabang yang akan menghimbau kepada seluruh karyawan berupa efisiensi penggunaan

Energi. Apabila diperlukan akan membuat Surat Edaran untuk seluruh karyawan berupa efisiensi penggunaan Energi.

C.2. Kapasitas Organisasi

Untuk mencapai visi dan misi BPR Batuartorejo perlu didukung oleh sumber daya yang handal dengan meningkatkan kemampuan/skill pegawai melalui pelatihan /pendidikan yang memadai dan pemenuhan anggota direksi sesuai ketentuan dan tata kelola perbankan yang sehat yang akan dijalankan bersamaan dalam proses merger.

Komposisi Pengurus BPR Batuartorejo:

Nama	Jabatan
1. Drs Agus Apriyono	Komisaris
2. Lulut Ainur Roisyah	Komisaris
3. Ichwanul Ridwan, SE., Ak.	Direktur
4. Dwi Astutik	PE Audit Intern
5. Puspita Ratnasari, SE.	PE Kepatuhan, MR, APU PPT, PPSPM

Komposisi Karyawan berdasarkan pendidikan

Jenjang Pendidikan	Jumlah
1. Pasca Sarjana	0
2. Sarjana (S1)	5 orang
3. Diploma/Sarjana Muda	5 orang
4. SMA Sederajat	6 orang
5. SMP Sederajat	0 orang
6. SD Sederajat	1 orang
Total	17 orang

Komposisi Karyawan berdasarkan Jenis Kelamin

Jenjang Pendidikan	2024
Jumlah Pegawai Laki-Laki	6 Orang
Jumlah Pegawai Wanita	11 Orang
Total Jml Karyawan	17 Orang

Pengembangan Sumber Daya Manusia

BPR Batuartorejo dalam melakukan pengembangan sumber daya manusia yang dilaksanakan oleh pengurus BPR dan dengan melakukan Pelatihan untuk pegawai baik secara offline maupun online agar BPR Batuartorejo dapat mengikuti perkembangan yang ada saat ini.

Jenis Pengembangan	Target	Indikator Keberhasilan
Program Pengembangan Pengurus (Direksi, Komisaris)	Pelatihan dan sertifikasi	Penerbitan Keputusan dan SOP tentang pelaksanaan RAKB
Program Pengembangan Karyawan (Pejabat Eksekutif)	Pelatihan dan sertifikasi	Penyusunan Program dan Pelaksanaan RAKB
Program Pengembangan Karyawan Lainnya	Pelatihan dan sosialisasi	Pelaksanaan Program RAKB

C.3. Kondisi Keuangan

Kondisi keuangan sesuai dengan penjelasan tabel di bawah ini :

a. Kinerja Keuangan

(Dalam Juta Rupiah)

Indikator	2025 TW (III)	2024	2023
a. Total Aset	Rp. 24.020	Rp. 23.418	Rp. 22.803
b. Modal Inti	Rp. 11.846	Rp. 10.246	Rp. 9.294
c. Kredit yang diberikan	Rp. 14.963	Rp. 14.578	Rp. 16.121
d. Dana Pihak Ketiga	Rp. 11.216	Rp. 11.678	Rp. 12.202
e. Pendapatan Operasional	Rp. 3.383	Rp. 3.889	Rp. 4.017
f. Beban Operasional	Rp. 2.161	Rp. 2.772	Rp. 3.074
g. Laba Operasional	Rp. 1.150	Rp. 1.059	Rp. 899

b. Rasio Keuangan

Rasio	2025 TW (III)	2024	2023
1. Rasio KPMM	99,57%	89,09%	72,78%
2. NPL Gross	42,36%	37,41%	35,33%
3. NPL Nett	25,01%	21,95%	25,99%
4. Return On Assets (ROA	6,75%	4,74%	4,44%
5. Net Interest Margin (NIM)	14,01%	13,21%	12,97%

6. Rasio BOPO	63,87%	71,28%	74,83%
7. Liquid to Deposit Rasio (LDR)	133,41%	125,90%	128,92%

Faktor-faktor yang mendukung penetapan tujuan dan prioritas Keuangan Berkelanjutan pada BPR adalah faktor internal yang dimiliki BPR dan faktor eksternal yang terjadi dilingkungan BPR. Faktor pendukung tersebut antara lain:

1. Rencana strategis bisnis yang telah ada
2. Kapasitas Organisasi yang dimiliki
3. Kondisi Keuangan dan kapasitas teknis yang dimiliki
4. Kerjasama dengan pihak eksternal
5. Strategi komunikasi
6. Sistem monitoring evaluasi dan mitigasi yang selama ini dijalankan; dan
7. Kebijakan pemerintah yang terkait dengan isu keuangan berkelanjutan

C.4. Strategi, Sistem dan Faktor Lainnya

a. Kapasitas Teknis

Penyempurnaan *core banking sistem*, penyempurnaan informasi BPR melalui website yang berbasis teknologi digital dan infrastruktur teknologi lain untuk mendukung aktivitas operasional dan pengembangan bisnis dimasa mendatang dan untuk mempermudah akses oleh stakeholder.

b. Kerjasama dengan Pihak Eksternal

Dalam program pengembangan kapasitas internal, BPR Batuartorejo akan bekerjasama dengan pihak ketiga eksternal untuk melaksanakan pelatihan sesuai dengan ketentuan regulasi.

c. Strategi Komunikasi

Secara internal BPR Batuartorejo berupaya menciptakan komunikasi yang baik untuk mewujudkan lingkungan kerja yang kondusif sebagai salah satu faktor pendukung peningkatan kinerja individu pegawai dan perusahaan secara berkelanjutan. Dalam konteks Keuangan Berkelanjutan, BPR Batuartorejo terus mengomunikasikan agar aktivitas operasional untuk mendukung pelestarian lingkungan melalui berbagai inisiatif diantaranya :

1. Melakukan penghematan penggunaan energi listrik, air, dan kertas.
2. Meningkatkan kepedulian dan pengetahuan pegawai tentang perilaku hidup ramah lingkungan.

d. Sistem Monitoring, Evaluasi dan mitigasi

Monitoring dilakukan secara periodik untuk memastikan rencana dilaksanakan dan dievaluasi terus berjalan untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Mekanisme monitoring yang dilakukan :

1. Rapat manajemen antara Dewan komisaris dan direksi yang di selenggarakan dalam rangka monitoring kondisi terkini
2. Rapat manajemen antar divisi yang dilaksanakan oleh divisi masing-masing untuk membahas permasalahan bisnis dan operasional.

e. Kebijakan Pemerintah

Pelaksanaan RAKB mengacu kepada regulasi dan kebijakan pemerintah. Implentasi Keuangan Berkelanjutan dengan meningkatkan kesadaran mengenai pemeliharaan dan menjaga lingkungan. Efiiensi penggunaan energi listrik, air maupun penggunaan kertas.

D. Prioritas dan Uraian RAKB

D.1. Dasar Pemikiran

Pengembangan dan penguatan organisasi perusahaan menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan Keuangan berkelanjutan beserta implementasinya dikarenakan organisasi menjadi landasan utama dalam membangun keuangan berkelanjutan. Pelaksanaan keuangan dimulai dari setiap tatanan organisasi. Komitmen serta dukungan dari manajemen merupakan salah satu faktor utama yang menjadi penentu dari terlaksananya program-program yang telah direncanakan. Dukungan dari setiap organisasi yang bertidak sesuai dengan tanggung jawabnya agar selaras dengan misi, visi, sasaran usaha dan strategi perusahaan serta memberikan pertimbangan kepada Direksi di dalam menentukan tindak lanjut penyelesaian atas kasus pelanggaran dan/atau kejahatan yang terjadi, yang meliputi pengenaan sanksi, pembenahan sistem dan pembenahan prosedur operasional.

D.2. Kegiatan Berkelanjutan dalam tahun 2025

No	Uraian Kegiatan	Periode Awal	Periode akhir	Sumber Daya yang dibutuhkan	Bagian/Divisi yang bertanggungjawab
1	Efisiensi penggunaan listrik	Mar	Apr	SDM	Bagian Umum
2	Pengurangan penggunaan kertas	Jun	Jul	SDM	Bagian Umum
3	Pebuatan surat edaran mengenai pemeliharaan dan menjaga lingkungan hidup	Feb	Maret	SDM	Kepatuhan
4	Penyusunan SOP Implementasi Keuangan Berkelanjutan	Okt	Nop	SDM	Bagian Kepatuhan
5	Penggunaan wadah minuman yang dapat digunakan berulang	Okt	Nop	SDM	Bagian Kepatuhan

D.3. Sumber Daya

Pelaksanaan kegiatan di atas membutuhkan dana yang berasal dari dana perusahaan. Kegiatan tersebut diatas akan dilaksanakan oleh divisi penanggung jawab kegiatan dengan melibatkan setiap unsur dalam struktur

organisasinya serta membutuhkan masukan dari regulator, Auditor eksternal maupun lembaga konsultan/praktisi dalam implementasinya.

D.4. Program Evaluasi Pelaksanaan

Pelaksanaan evaluasi dilihat dari indikator dan timeline yang ditetapkan oleh divisi terkait.

D.5. Tantangan dan Rencana

Tantangan eksternal antara lain adanya perubahan kebijakan pemerintah, kondisi permintaan agregat masyarakat atas program keuangan berkelanjutan dan lain sebagainya.

E. Tindak Lanjut RAKB dan Evaluasi RAKB

E.1. Pegawai, Pejabat dan Unit Kerja yang Bertanggung Jawab terhadap Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan Evaluasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan di atas berada dibawah Direktur Kepatuhan dan dievaluasi setiap periode akhir kegiatan. Sistem evaluasi dan pelaksanaan program aksi bertujuan untuk pemantauan efektivitas pelaksanaan dan pencapaian program aksi, termasuk tindakan yang harus dilakukan dalam hal terdapat permasalahan dalam pelaksanaan dan pencapaian baik jangka pendek maupun jangka panjang. Secara spesifik peran Direktur Kepatuhan dan masing-masing kepala divisi terkait dibantu oleh divisi Kepatuhan dalam memantau pelaksanaan Keuangan Berkelanjutan. Dari sisi MR melakukan monitoring risiko kredit dan risiko lainnya terkait penerapan Keuangan Berkelanjutan sesuai kerangka penerapan manajemen risiko.

E.2. Penentuan Waktu untuk Mengukur Realisasi RAKB

Untuk memastikan efektivitas realisasi Rencana Keuangan berkelanjutan diperlukan penentuan jangka waktu secara berkala dengan mempertimbangkan koordinasi antara para pihak, standar yang dibuat dalam pelaksanaannya, serta pemahaman yang sama dalam pelaksanaan, maka waktu pengukuran dan penyampaian realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan diatur sebagai berikut :

1. Pemantauan Realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan tahun berjalan Periode Pelaksanaan : Triwulan Divisi penanggung jawab Penyusun RBB/RKA dan RAKB bekerjasama dengan divisi terkait
2. Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Periode Pelaksanaan : November tahun berjalan Divisi penanggung jawab Penyusun RBB/RKA dan RAKB bekerjasama dengan divisi terkait.
3. Laporan Keberlanjutan Periode Pelaksanaan : Paling lambat akhir Juni Tahun berikutnya Divisi penanggung jawab Penyusun RBB/RKA dan RAKB bekerjasama dengan divisi terkait.

E.3. Tindak lanjut dari rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Dalam hal rencana aksi keuangan berkelanjutan belum dapat terealisasi sesuai dengan harapan dan waktu yang direncanakan, maka Bank akan melakukan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Mengkaji ulang indikator kinerja yang dipergunakan untuk tahun berikutnya
2. Melakukan revisi atas rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan dengan mempertimbangkan kelemahan pada penyusunan sebelumnya.

E.4. Mitigasi Risiko Dalam Hal Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Tidak Dapat Dilaksanakan dengan Baik atau Tidak Mencapai Tujuan yang diinginkan

Untuk memitigasi risiko yang ditimbulkan dari pelaksanaan keuangan berkelanjutan, BPR Batuartorejo melakukan pemetaan risiko terlebih dahulu atas setiap rencana prioritas sehingga dapat menghasilkan mitigasi sebagai berikut :

1. Dalam hal memitigasi risiko atas penyesuaian organisasi, manajemen risiko, tata kelola dan/atau Standar Prosedur Operasional yang mendukung keuangan berkelanjutan maka diperlukan sosialisasi tentang pentingnya keuangan berkelanjutan bagi semua pemangku kepentingan dan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan untuk kehidupan saat ini dan generasi yang akan datang, sehingga usaha perbankan yang dijalankan bisa tetap bertahan dan semakin berkembang di masa-masa yang akan datang.
2. Pengembangan sumber daya manusia dalam mengelola Keuangan Berkelanjutan,
 - Meningkatkan kapasitas pegawai agar lebih memahami program Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan ini antara lain untuk pegawai yang bekerja di unit manajemen risiko, pengembangan bisnis dan pelayanan nasabah.
 - Mulai merancang dan mengimplementasikan program peningkatan kapasitas intern sebelum waktu mulai implementasi. Prioritas ditujukan bagi pengurus bank dan pegawai yang bertanggung jawab terhadap implementasi Keuangan Berkelanjutan. Untuk selanjutnya, target jangka panjang program peningkatan kapasitas intern ditujukan untuk seluruh pegawai karena keberhasilan implementasi Keuangan Berkelanjutan memerlukan dukungan seluruh pegawai.
 - Menyiapkan sumber daya manusia yang dimiliki untuk menjalankan program-program Keuangan Berkelanjutan. Penyiapan sumberdaya manusia dapat berupa penyesuaian kriteria dalam proses rekrutmen pegawai baru, pelatihan, proses pengayaan, penyesuaian, penilaian kinerja dan sistem remunerasi.
3. Pengembangan dan penyesuaian Produk dana dan jasa serta layanan perbankan yang mendukung Keuangan Berkelanjutan.
 - Mencermati dan mempertahankan pasar yang diyakini akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan & pemberdayaan sektor binaan UMKM dan potensi lainnya.

- Mencermati situasi ini, maka BPR Batuartorejo akan melakukan inovasi layanan untuk memudahkan kebutuhan nasabah salah satunya adalah layanan mobil Kas Keliling yang didesain khusus untuk memenuhi transaksi perbankan nasabah di manapun dan kapanpun.
- Jumlah dan persentase produk dan jasa yang sudah dievaluasi keamanannya bagi pelanggan. Informasi ini memastikan bahwa bank hanya menjual produk dan jasa yang sudah teruji keamanannya melalui penyampaian risiko dan pemilihan mitra bisnis.
- BPR Batuartorejo memberikan perlindungan dan keamanan produk bagi nasabah dengan memberikan keamanan dan nyaman dalam setiap fitur layanan kepada nasabah. Fitur layanan akan selalu dikembangkan dengan dukungan sistem teknologi informasi dalam area ketersediaan layanan sistem (*system availability*), keandalan sistem (*system reliability*) dan sistem keamanan (*security*). Penerapan sistem deteksi penipuan (*Fraud detection system*) juga diawasi secara ketat. Diupayakan seluruh produk telah diuji keamanannya, untuk memastikan risiko kerugian yang seminimal mungkin atas produk tersebut, BPR Batuartorejo akan selalu memberikan informasi atas semua risiko yang dapat terjadi kepada nasabah sebagai bahan pertimbangan menggunakan produk yang ditawarkan lebih lanjut.
- Mengidentifikasi dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan dari produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan melalui metode survei kepuasan pelanggan terhadap Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan apabila kita telah menerbitkan produk tersebut. Survei merupakan salah satu sarana bagi BPR Batuartorejo dalam melakukan komunikasi dan pelibatan pemangku kepentingan. Hasil survei dan mitigasi yang dilakukan untuk menanggulangi dampak negative akan disampaikan kepada pemangku kepentingan untuk menunjukkan transparansi dan keseimbangan penyampaian informasi, yang tidak hanya pada dampak positif saja.
- BPR Batuartorejo akan senantiasa menjaga hubungan baik dengan nasabah sebagai salah satu pemangku kepentingan utama, untuk memperoleh masukan yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja bank. Selain nasabah, masukan

dari pemangku kepentingan lainnya, seperti karyawan, masyarakat sekitar, Regulator juga perlu diperhatikan oleh bank.

4. Penyaluran kredit berbasis lingkungan.

- Mempertahankan dan meningkatkan portofolio pembiayaan yang berdampak positif bagi aspek lingkungan dan sosial.
- Meningkatkan kapasitas perbankan dalam memahami risiko lingkungan serta dampak positif dari kredit yang disalurkan.
- Memperkuat kolaborasi dan koordinasi bank dengan sektor industri hijau

5. Penggunaan sarana dan prasarana yang mendukung aspek keberlanjutan dalam aktifitas operasional Bank.

Mitigasi risiko diatas dapat dilakukan dengan mencegah /membatasi/mengurangi/memperbaiki kerusakan lingkungan hidup, mengurangi peningkatan polusi, mengurangi limbah, mencegah kerusakan ekosistem dan ketidakadilan/ kesenjangan sosial, termasuk pencegahan dan penanganan polusi/limbah, tidak memicu dan berdampak pada konflik sosial, berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlindungan lingkungan hidup dan proses produksi rendah karbon, serta memberikan solusi bagi masyarakat yang menghadapi dampak perubahan iklim termasuk pembaruan teknologi hemat energi dan rendah emisi, konservasi sumber daya dan daur ulang, perbaikan kesejahteraan masyarakat yang terdampak.

Penutup

Demikian Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan ini disusun untuk menjadi pedoman dan acuan bagi Direksi dalam melaksanakan Implementasi Keuangan Berkelanjutan.

